



GEMA PERENCANA

Volume 2, Nomor 1, Mei - Agustus 2023

Halaman 1 - 184

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	i -xii
MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ANALISIS DESKRIPTIF PERSPEKTIF HETEROGENITAS DI INDONESIA	
Redho Slamet Pribadi -----	1 - 8
URGENSI PEMBANGUNAN MA'HAD AL-JAMI'AH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN (STUDI DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)	
Sobi Ghozani -----	9 - 26
ANALISIS PENERAPAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN	
I Nengah Nirmala Dwi Wahyudi -----	27 - 48
HALAL TOURISM AS A STRATEGY TO MAXIMIZE EMPLOYMENT ABSORPTION IN LAMPUNG	
Mairizal Salehudin Siatan -----	49 - 60
KEBIJAKAN PENEGERIAN MADRASAH PADA KEMENTERIAN AGAMA RI: SEBUAH TELAAH DESKRIPTIF	
Ahmad Khanali -----	61 - 78
KEBIJAKAN ALOKASI PEMBAGIAN DANA BOS SESUAI JUMLAH STANDAR MINIMAL	
Muh. Tahir K. -----	79 - 98

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DIGITAL SISWA MADRASAH DI SUMATERA BARAT	
Loly Volia -----	99 - 118
PERAN PENGHULU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN NIKAH RUJUK	
M. Zubir -----	119 - 130
LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN PEGAWAI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	
La Indo Asa -----	131 - 146
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SMART ASN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO	
Raino Wiwoho dan Fera Diana -----	147 - 160
STRATEGI GURU PAI DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA PADA SISWA DI KABUPATEN SIAK	
Pebri Edy -----	161 - 174
STRATEGI PERENCANAAN PENDIDIKAN MADRASAH DALAM MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	
Setiyono -----	175 - 184

SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 2 Nomor 1, Mei-Agustus 2023** setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic -International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 2 Nomor 1, Mei-Agustus 2023** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 12 (duabelas) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI. Keduabelas artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**, di mana bahasan terkait dalam bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan Pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2023
Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Redho Slamet Pribadi

Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama R.I.

Email: redho.spribadi@gmail.com

INGGRIS

RELIGIOUS MODERATION: DESCRIPTIVE ANALYSIS STUDY OF HETEROGENITY PERSPECTIVES IN INDONESIA

This article describes the Indonesian nation is a multicultural society with its pluralistic nature. Diversity includes differences in culture, religion, race, language, ethnicity, tradition and so on. In such a multicultural society, tensions and conflicts often occur between cultural groups and have an impact on the harmony of life. The purpose of this writing is to discuss the cultural diversity of the Indonesian nation, religious moderation in diversity and the role of religious instructors in realizing the peace of the Indonesian people. The method used is library research. The conclusion of this study is that in the life of a heterogeneous Indonesian society, multicultural understanding and awareness is needed that respects differences, pluralism and a willingness to interact fairly with anyone. An attitude of religious moderation is needed in the form of acknowledging the existence of other parties, having a tolerant attitude, respecting differences of opinion and not imposing their will by means of violence. The role of the government, community leaders and religious instructors is needed to socialize and develop religious moderation to the community for the sake of harmony and peace.

Keywords: Religion Moderation; Perspective; Heterogeneity

INDONESIA

MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ANALISIS DESKRIPTIF PERSPEKTIF HETEROGENITAS DI INDONESIA

Artikel ini menguraikan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat beragam budaya dengan sifat kemajemukannya. Keragaman mencakup perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dan sebagainya. Dalam masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi ketegangan dan konflik antarkelompok budaya dan berdampak pada keharmonisan hidup. Tujuan penulisan ini adalah membahas keragaman budaya bangsa Indonesia, moderasi beragama dalam keragaman dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan kedamaian bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogenitas diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan kemauan berinteraksi dengan siapa pun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkembangkan moderasi beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.

Kata Kunci : Moderasi Agama; Perspektif; Heterogenitas

Sobi Ghozani

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email: sobighozani@iainpekalongan.ac.id

INGGRIS

THE URGENCY OF DEVELOPMENT MA'HAD AL-JAMI'AH IN IMPLEMENTING BOARDING- BASED EDUCATION (STUDY AT UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)

This article describes issue of implementation of Islamic boarding school -based education that needs to be supported by adequate facilities and infrastructure, one of which is the student dormitory building of UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, as the only State Islamic Religious College in the former residency of Pekalongan. This article aims to analyze the urgency of the Ma'had Al-Jami'ah student dormitory development program for the implementation of Islamic boarding school-based education at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan and to examine various opportunities to realize this based on existing conditions. This article uses a qualitative research method, with a descriptive exploratory approach. Data were obtained from various literary sources that are considered credible and from Ma'had Al-Jami'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan related to the student dormitory development program. Then to analyze the data that has been collected, the authors use content analysis techniques. Based on the study conducted, it was found that the student dormitory building at the State Islamic Religious College has two main functions. First, as a proper place to live for students. Second, as a place for Islamic boarding school-based education in higher education by Ma'had Al-Jami'ah. The aims, objectives and benefits of building the Ma'had Al-Jami'ah student dormitory are very important and strategic for UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan as mapped by Ma'had Al-Jami'ah in the 2022 Ma'had Al-Jami'ah Special Dormitory Development Proposal. The most visible obstacle at this time is more on the budget side to fund this strategic project. The researcher proposes a financing model as practiced by other PTKIN (IAIN Kendari), namely through a student dormitory construction assistance scheme from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR).

Keywords: Student Dormitory, Islamic Boarding School-Based Education, Ma'had Al-Jamiah

INDONESIA

URGENSI PEMBANGUNAN MA'HAD AL- JAMI'AH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN (STUDI DI UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN)

Artikel ini menguraikan masalah penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah gedung asrama mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di wilayah eks-karesidenan Pekalongan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi program pembangunan asrama mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk mengkaji berbagai peluang guna merealisasikan hal tersebut berdasarkan kondisi yang ada. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang dianggap kredibel dan dari Ma'had Al-Jami'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berkaitan dengan program pembangunan asrama mahasiswa. Kemudian untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik content analysis. Berdasarkan kajian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa gedung asrama mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri memiliki dua fungsi utama: *Pertama*, sebagai tempat tinggal yang layak bagi mahasiswa. *Kedua*, sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren di lingkungan perguruan tinggi oleh Ma'had Al-Jami'ah. Maksud, tujuan, dan manfaat dari pembangunan asrama mahasiswa Ma'had Al-Jami'ah sangatlah penting dan strategis bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagaimana yang telah dipetakan oleh Ma'had Al-Jami'ah dalam Proposal Pembangunan Rumah Susun Khusus Asrama Ma'had Al-Jami'ah Tahun 2022. Kendala yang paling terlihat saat ini lebih pada sisi anggaran untuk mendanai proyek strategis tersebut. Peneliti mengusulkan model pembiayaan sebagaimana yang dilakukan oleh PTKIN lain (IAIN Kendari), yaitu melalui skema bantuan pembangunan asrama mahasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kata Kunci : Asrama Mahasiswa, Pendidikan Pesantren, Ma'had Al-Jamiah

I Nengah Nirmala Dwi Wahyudi
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan - Bali
E-mail: wahyudi.dwi62@gmail.com

INGGRIS

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES IN THE FRAMEWORK OF IMPROVING THE QUALITY OF RELIGIOUS SERVICES AT THE OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION, TABANAN DISTRICT

This article describes issue of religious services as one type of public service that aims to meet public needs for quality services that are easily accessible to the public. The office of the Ministry of Religion of Tabanan Regency is the service provider as mandated by UU No. 25 Year 2009 and PMA No. 65 Year 2016. Service delivery is carried out through the One Stop Integrated Service (PTSP). PTSP services have not been able to provide quality services according to community needs. Providing quality public services requires a strategy that makes it easier for the public to access and know the types of services being provided. In identifying strategies it is analyzed through the Customer Relationship Management (CRM) approach and Porter's Competitiveness Diamond Model (PCDM) to analyze the level of service competitiveness and in analyzing strategies using SWOT by selecting one of several alternative strategies available using the Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) and External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) methods.

Keywords: *Public Service, Excelent Services, CRM, PCDM, SWOT*

INDONESIA

ANALISIS PENERAPAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABANAN

Artikel ini menguraikan masalah pelayanan keagamaan sebagai salah satu jenis layanan publik, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas layanan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan adalah penyelenggara layanan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009 dan PMA No. 65 Tahun 2016. Penyelenggaraan layanan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan PTSP belum mampu memberikan layanan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk menyediakan layanan publik berkualitas memerlukan strategi yang memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dan mengetahui jenis layanan yang diselenggarakan. Dalam mengidentifikasi strategi dianalisis melalui pendekatan *Customer Relationship Management* (CRM) dan *Porter's Competitiveness Diamond Model* (PCDM) untuk menganalisa tingkat daya saing layanan serta dalam menganalisis strategi menggunakan *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT), dengan memilih satu dari beberapa alternatif strategi yang tersedia menggunakan metode *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS) dan *External Strategic Factors Analysis Summary* (EFAS).

Kata Kunci : Layanan Publik, Kualitas Layanan, CRM dan PCDM, SWOT

Mairizal Salehudin Siatan

Perencana Ahli Muda, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
E-mail: mairizal@radenintan.ac.id

INDONESIA

WISATA HALAL SEBUAH STRATEGI UNTUK MEMAKSIMALKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI LAMPUNG

Artikel ini menguraikan bahwa diharapkan negara ini mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan temuan investigasi dampak ekspansi ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, analisis akan digunakan untuk mencari korelasi antar variabel, penyebab dasar, dan potensi solusi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh PDRB/pangsa sektor pariwisata, Jumlah Penduduk Tamat SMA, dan persentase perubahan tingkat hunian kamar. PDRB/pangsa sektor pariwisata memiliki hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah penduduk yang memiliki hubungan positif dengan jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir tamat SMA. Pariwisata diyakini bisa menjadi solusi atas rendahnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung. Pengembangan wisata halal selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga akan dapat memacu penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Berdasarkan nilai R^2 sebesar 0,995 diketahui jika terdapat pengaruh yang cukup baik antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 99,5 persen, sedangkan sisanya 0,5 persen mengungkapkan adanya fakta lain yang tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian.

Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Halal

INGGRIS

HALAL TOURISM AS A STRATEGY TO MAXIMIZE EMPLOYMENT ABSORPTION IN LAMPUNG

This article describes that it is hoped that this country would be able to create many jobs in order to have strong economic growth. The goal of this study is to give the findings of an investigation of the impact of economic expansion on labor absorption in the province of Lampung. In order to address the labor issues in Lampung Province, analysis will be used to seek for correlations between variables, underlying causes, and potential policy solutions. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the absorption of labor in Lampung Province is influenced by GRDP/share of tourism sector, Total Population Completed High School, and percentage change in room occupancy rate. GRDP/share of tourism sector has a significant relationship between the number of working people. The number of people who work has a significant relationship to the number of residents who have a positive relationship to the number of people who work with the last education graduated from high school. Tourism is believed to be a solution to the low employment absorption in Lampung province. The development of halal tourism besides being able to increase economic growth will also be able to spur maximum employment absorption. Based on the R^2 value of 0.995, it is revealed if there is a good enough influence on the independent variable on the dependent variable as shown by the total working population of 99.5 percent, while the remaining 0.5 percent reveals that there are other facts that are not included in the scope of the research.

Keywords : Labor Absorption, Economic Growth, Halal Tourism

Ahmad Khanali

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
E-mail: ali.pendis2009@gmail.com

INGGRIS

MADRASAH STATE POLICY AT THE RELIGION MINISTRY OF RELIGION: A DESCRIPTIVE REVIEW

This article describes the background to the uneven access and quality of madrasah education, with the condition of the existence of only 5% of public madrasa while most of the rest are private madrasa. This condition reflects the high role of the community in the implementation of madrasa education and the still not optimal management of madrasa by the government. The emergence of a madrasa nationalization policy with the hope that state madrasa could become reference madrasa or model madrasa for other madrasa in their vicinity. The author's goal in compiling this policy paper is to describe the extent to which the madrasah nationalization policy is needed and how the nationalization policy strategy is carried out. In order to ensure that this manuscript is able to answer the above objectives, the authors use a descriptive analysis approach. The madrasa nationalization policy carried out has a significant urgency in improving the quality of madrasah education and has been proven empirically from various studies. In addition, the madrasa nationalization policy also has several benefits. Madrasa nationalization policies can be carried out in tandem with the establishment of madrasa which are organized by the Government or the community with reference to the Regulation of the Minister of Religion Number 90 of 2013 concerning Implementation of Madrasa Education. This paper ultimately recommends 4 (four) things, namely: First, madrasah management as a follow-up policy still needs to be carried out to improve the quality of madrasa. Second, madrasah reform is carried out on a rolling basis and involves related parties, namely the Ministry of Religion, support from parents and the surrounding community, the head of the madrasa together with teachers, foundation administrators and community leaders. Third, alternative implementation of private madrasah reform with three priorities and Fourth, private madrasah reform has consequences related to madrasa operational budgets and human resources.

Keywords: Education, Madrasa, State Policy

INDONESIA

KEBIJAKAN PENEGERIAN MADRASAH PADA KEMENTERIAN AGAMA RI: SEBUAH TELAHAH DESKRIPTIF

Artikel ini menguraikan tentang latar belakang belum meratanya akses serta mutu pendidikan madrasah, dengan kondisi keberadaan madrasah negeri yang hanya 5% sedangkan terbanyak sisanya merupakan madrasah swasta. Kondisi ini mencerminkan tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah dan masih belum optimalnya pengelolaan madrasah yang dilakukan oleh pemerintah. Munculnya kebijakan penegerian madrasah dengan harapan agar madrasah negeri bisa menjadi madrasah rujukan atau madrasah model bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Tujuan penulis menyusun naskah kebijakan ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana perlunya kebijakan penegerian madrasah dan bagaimana strategi kebijakan penegerian itu dilakukan. Dalam rangka memastikan bahwa naskah ini mampu menjawab tujuan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Kebijakan penegerian madrasah yang dilakukan memiliki urgensi yang cukup penting dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan terbukti secara empiris dari berbagai penelitian. Di samping itu, kebijakan penegerian madrasah juga memiliki beberapa manfaat. Kebijakan penegerian madrasah bisa dilakukan beriringan dengan pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Naskah ini pada akhirnya merekomendasikan 4 (empat) hal, yaitu: *Pertama*, penegerian madrasah sebagai sebuah kebijakan lanjutan tetap perlu dilakukan untuk peningkatan mutu madrasah; *Kedua*, penegerian madrasah dilakukan dengan secara bergulir dan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu: Kementerian Agama, dukungan dari orang tua murid dan dukungan masyarakat sekitar, Kepala madrasah bersama guru, pengurus yayasan dan tokoh masyarakat; *Ketiga*, alternatif pelaksanaan penegerian madrasah swasta dengan tiga prioritas; dan *Keempat*, penegerian madrasah swasta memberikan konsekuensi terkait anggaran operasional madrasah dan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Pendidikan, Madrasah, Penegerian

Muh. Tahir K.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
E-mail: muhtahir79@gmail.com

INGGRIS

BOS FUNDING ALLOCATION POLICY ACCORDING TO MINIMUM STANDARD AMOUNT

This article describes that the BOS Fund Budget is a government program given to education units on the basis of reducing the cost of non-personal education to students who can't afford it, in order to relieve students and carry out compulsory education programs and expand access in an effort to improve the quality of education, because almost all activity costs that have been programmed can utilize the BOS Fund Budget. The BOS Funds Budget Program aims to reduce the burden on society in financing education in the context of the Quality 9 Year Compulsory Education Program, the BOS Funds Budget also plays a role in accelerating the achievement of Minimum Service Standards (SPM) in schools that do not yet meet the SPM, and achievement of the National Education Standards (SNP).) in schools that have met the MSS. The purpose of this article is to find out to what extent the allocation of BOS funds has met the minimum standard amount. The method used in this study is qualitative research, in which the author will present the data found in the field. While the type of research used is descriptive type, which only describes phenomena, symptoms, events, and incidents that occur.

Keywords: Allocation, BOS Fund, Minimum Standard

INDONESIA

KEBIJAKAN ALOKASI PEMBAGIAN DANA BOS SESUAI JUMLAH STANDAR MINIMAL

Artikel ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana BOS merupakan program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan atas dasar pengurangan biaya pendidikan non-personal kepada peserta didik yang tidak mampu, agar meringankan peserta didik serta melaksanakan program wajib belajar dan perluasan akses dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir semua biaya kegiatan yang telah diprogramkan dapat memanfaatkan Anggaran Dana BOS tersebut. Program Anggaran Dana BOS bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, Anggaran Dana BOS juga berperan dalam percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang telah memenuhi SPM. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana alokasi pembagian dana BOS telah sesuai jumlah standar minimal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penulis akan menyajikan data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif, yang hanya menggambarkan fenomena, gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi.

Kata Kunci : Alokasi, Dana BOS, Standar Minimal

Loly Volia

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
E-mail: l.volia@yahoo.co.id

INGGRIS

MADRASAH STUDENT DIGITAL SKILLS IMPROVEMENT PROGRAM IN WEST SUMATERA

This article describes that individual internet penetration in Indonesia has continued to increase during 2017–2021 to reach 62.10 percent in 2021. One indicator of information and communication technology development is the level of internet utilization. In general, this study aims to analyze opportunities for internet utilization in respondents with madrasah and Islamic boarding school education compared to public schools in West Sumatra. This can describe the successful implementation of ICT subjects for madrasah and Islamic boarding school students compared to general school students. Policy recommendations related to increasing digital skills in madrasah and Islamic boarding school students are based on the results of logistic regression statistical analysis on BPS September 2021 Susenas (National Socioeconomic Survei) data on 7,287 respondents in the West Sumatra region. The results of the descriptive analysis show that only 60 percent of respondents in West Sumatra use the internet. Statistically, all independent variables (region classification, age, gender, and education) have a significant effect on the opportunity to use the internet. Urban respondents have the opportunity to use the internet 2.69 times higher than respondents in rural areas. The opportunity for respondents who are teenagers (≤ 24 years old) to use the internet is 6.69 times higher than those who are adults. The opportunity for male respondents to use the internet is 1.27 times higher than that of women. Opportunities for respondents with educational background in madrasa and Islamic boarding schools to utilize the internet are 1.76 times higher than respondents with education in public schools.

Keywords: Internet, Digital, Madrasah, Logistics

INDONESIA

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN DIGITAL SISWA MADRASAH DI SUMATERA BARAT

Artikel ini menguraikan bahwa penetrasi internet individu di Indonesia terus meningkat selama 2017–2021 hingga mencapai 62,10 persen pada tahun 2021. Salah satu indikator pembangunan teknologi informasi dan komunikasi adalah tingkat pemanfaatan internet. Secara umum, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemanfaatan internet pada responden pendidikan madrasah dan pondok pesantren dibandingkan dengan sekolah umum di Sumatera Barat. Ini bisa menggambarkan keberhasilan implementasi mata pelajaran TIK siswa madrasah dan pondok pesantren dibanding siswa sekolah umum. Rekomendasi kebijakan terkait peningkatan kemampuan digital pada siswa madrasah dan pesantren ini berdasarkan hasil analisis statistik regresi logistik pada Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS September 2021 terhadap 7.287 responden di wilayah Sumatera Barat. Hasilnya, analisis deskriptif menunjukkan, baru 60 persen responden Sumatera Barat yang memanfaatkan internet. Secara statistik, semua variabel bebas (klasifikasi wilayah, usia, jenis kelamin, dan pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap peluang pemanfaatan internet. Responden perkotaan berpeluang untuk memanfaatkan internet lebih tinggi 2.69 kali lipat dibandingkan dengan responden di Perdesaan. Peluang responden usia remaja (≤ 24 tahun) untuk memanfaatkan internet lebih tinggi 6.69 kali lipat dibandingkan dengan yang sudah berusia dewasa. Peluang responden laki-laki untuk memanfaatkan internet lebih tinggi 1.27 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Peluang bagi responden dengan latar belakang pendidikan madrasah dan pesantren untuk memanfaatkan internet lebih tinggi 1.76 kali lipat dibandingkan responden dengan pendidikan di sekolah umum.

Kata Kunci : Internet, Digital, Madrasah, Logistik

M. Zubir

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh
E-mail: gifarazubir@gmail.com

INGGRIS

THE ROLE OF MARRIAGE CHIEF 'PENGHULU' IN INCREASING QUALITY OF REMARRY 'RUJUK' SERVICES

This article describes that the Office of Religious Affairs (KUA) is a work unit of the Ministry of Religion at the District level in serving the needs of the community. One of the 10 most important tasks and functions of the KUA is: "organizing the process of recording marriage contracts". In this case, the position of the headman plays an important role in the context of the success and running of government programs related to the issue of marriage registration so that they can run well and optimally. For this reason, a penghulu is required to always be active and creative in providing services to the public in a professional manner, with the principles of humanity and justice. Furthermore, the task of the prince in improving service and improving the quality of the family is to provide marriage/referral consultation services through Pre-Marriage coaching to prospective brides and grooms which are carried out in accordance with the conditions of each region, in an effort to comply with applicable regulations in the field of NR services. Therefore, the formulation of this paper is how far the prince's efforts are in improving the quality of Marriage and Reconciliation services and how the performance and professionalism of the prince as an expert and professional position. The aim is to find out how far the prince's efforts are in improving the quality of marriage and reconciliation services and to find out the Performance and Professionalism of the Penghulu as an expert and professional position. While the benefit of this paper is to provide broader insights in an effort to increase the ability of the headmaster to provide services to the community. In describing this problem, the author uses a quantitative method with collection steps, namely: the author uses the methods: square research (field research), library research (library research), descriptive research (describes and interprets the current situation) to provide a clearer picture about social situations, and through interviews. Then the authors analyze the data using inductive and deductive methods.

Keywords: *The Role of Marriage Chief, To Increase, Quality, Service, Remarriage*

INDONESIA

PERAN PENGHULU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN NIKAH RUJUK

Artikel ini menguraikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama di tingkat Kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Salah satu di antara 10 tugas dan fungsi KUA yang paling penting adalah: "menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah". Dalam hal ini, jabatan penghulu memegang peranan penting dalam rangka menyukseskan dan menjalankan program pemerintah terkait masalah pencatatan pernikahan supaya dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk itu, seorang penghulu dituntut selalu aktif dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Selanjutnya, tugas penghulu dalam peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas keluarga adalah dengan memberikan pelayanan konsultasi nikah/ rujuk melalui pembinaan Pra Nikah kepada calon pengantin yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dalam upaya menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang pelayanan NR. Karena itu, rumusan tulisan ini adalah sejauhmana upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk dan bagaimana Kinerja dan profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana upaya penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk serta untuk mengetahui Kinerja dan Profesionalitas Penghulu sebagai jabatan keahlian dan profesional. Sedangkan manfaat tulisan ini adalah untuk memberikan wawasan lebih luas dalam upaya peningkatan kemampuan penghulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menguraikan masalah ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan langkah-langkah pengumpulan, yaitu: penulis menggunakan metode: *square research* (riset lapangan), *library research* (riset perpustakaan), *descriptive research* (melukiskan dan menafsirkan keadaan sekarang) untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial, dan melalui wawancara. Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode induktif dan deduktif.

Kata Kunci : Peran Penghulu, Meningkatkan, Kualitas, Pelayanan, Nikah Rujuk

La Indo Asa

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah
E-mail: asalaindo@kemenag.go.id

INGGRIS

IN THE ENVIRONMENT OF CENTRAL GOVERNMENT AGENCIES AND LOCAL GOVERNMENTS, STRATEGIC STEPS FOR COMPLETING HONORARY EMPLOYEES

This study aims is to find out the Strategic Steps for Completion of Honorary Employees in the Environment of Central Government Agencies and Regional Governments in Central Buton Regency at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Central Buton Regency, the formulation of the problem in this paper is; What are the Strategic Steps for Completion of Honorary Staff in Central Government Agencies and Regional Governments at the Office of the Ministry of Religion in Central Buton Regency? While this research uses qualitative research methods, the type of research used by researchers is descriptive. The research results show that; With the issuance of Circular No. b/185/m.sm.02.03/2022 regarding the Elimination of Honorarium, the government must respect the rights and obligations of the community and maintain their welfare. This also applies to the community, depending on the capacity of the honorarium they accommodate or receive. Thus, the mandate of the Government Regulation can provide status certainty for non-ASN employees to become ASN because ASN already has a standard of income/compensation. Meanwhile, by becoming an outsourced worker in a company, the wage system is subject to the Manpower Law, where there is a regional minimum wage/provincial minimum wage (UMR/UMP), especially in the Ministry of Religion. So that the Ministry of Religious can reconcile the employment status of non-ASN employees (non-PNS, non-PPPK, and ex-Honorary Staff).

Keywords: Honorary, Central Government, Regional Government

INDONESIA

LANGKAH STRATEGIS PENYELESAIAN PEGAWAI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui Langkah Strategis Penyelesaian Pegawai Tenaga Honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Buton Tengah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, rumusan masalah pada tulisan ini adalah; Bagaimanakah Langkah Strategis Penyelesaian Pegawai Tenaga Honorer di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah? Sedangkan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Dengan diterbitkannya Surat Edaran No. b/185/m.sm.02.03/2022 tentang Penghapusan Honorarium, maka pemerintah harus menghormati hak dan kewajiban masyarakat serta menjaga kesejahteraannya. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat, tergantung pada kapasitas honorarium yang mereka tampung atau terima. Dengan demikian, amanat Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat memberikan kepastian status kepada pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan/kompensasi. Sedangkan dengan menjadi tenaga alih daya (*outsourcing*) di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada UU Ketenagakerjaan, dimana ada upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP) khususnya di Kementerian Agama. Sehingga melalui Kementerian Agama dapat menyelesaikan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer).

Kata Kunci : Honorer, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Raino Wiwoho

Kementerian Agama Kabupaten Bungo
E-mail: raywiwoho@yahoo.com

Fera Diana

Kementerian Agama Kabupaten Bungo
E-mail: makro.feradiana@gmail.com

INGGRIS

**THE EFFECTIVENESS OF
IMPLEMENTING THE SMART ASN
APPLICATION AT THE OFFICE OF THE
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
IN BUNGO REGENCY**

This article aims to determine the effectiveness of using SMART ASN Application in order to improve the monitoring of employees discipline in The Office of Ministry of Religion of Bungo Regency. The method used in this study is quantitative with descriptive approach through primary data was obtained by interview. Based on the identification of 15 respondents to the three indicators of effectiveness, goal attainment, integration, and adaptation, it is known that the implication of ASN SMART Application in increasing supervision of the discipline of the employees of The Office of Ministry of Religious Affairs of Bungo Regency has been carried out well but because there are still several obstacles in its application, it can be assessed as less effective. The obstacle is when the application cannot be accessed so employees must report their presence to human resources field and do the manual report.

Keywords: *Effectiveness, SMART ASN Application, Monitoring, Discipline*

INDONESIA

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI
SMART ASN DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BUNGO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Aplikasi SMART ASN dalam meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan identifikasi 15 responden terhadap tiga indikator efektivitas, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, diketahui bahwa penerapan Aplikasi SMART ASN dalam meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo sudah terlaksana dengan baik. Namun karena masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya, maka dapat dinilai kurang efektif. Hambatan tersebut, yaitu saat aplikasi tidak dapat diakses sehingga pegawai harus melaporkan kehadirannya ke Urusan Kepegawaian dan melakukan presensi manual.

Kata Kunci : Efektivitas, Aplikasi SMART ASN, Pengawasan, Kedisiplinan

Pebri Edy

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak
E-mail: pebriedy.riau1979@gmail.com

INGGRIS

PAI TEACHER'S STRATEGY IN INSTALLING RELIGIOUS MODERATION VALUES IN STUDENTS IN SIAK DISTRICT

This article describes about Regulation of the Minister of Religious says that religious teachers are required to be able to strengthen religious moderation among students, so PAI teachers in Siak Regency make efforts to foster religious moderation for students through various strategies and certain coaching methods to build religious moderation values. The aims of this study are: First, to describe how the efforts of PAI teachers in fostering religious moderation; Second, to find out the supporting and inhibiting factors in fostering religious moderation. This study uses a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the efforts made by PAI teachers in fostering religious moderation are by conducting coaching inside and outside the classroom using strategies and methods. The strategy used is a direct strategy by providing directions, examples, both inside and outside the classroom and an indirect strategy by providing prohibitions and prevention, while the method used is: (a) the method of exemplary by setting a good example for students; (b) the method of providing advice by giving advice before and towards the end of learning; (c) the method of discipline by giving rules; (d) the method of habituation by familiarizing students to attend recitation and apples; (e) the method of giving special attention to pay attention to the development of student attitudes that reflect religious moderation; and (f) the method of punishment by giving sanctions in the form of reducing religious values for students who violate the rules.

Keywords: PAI Teacher, Moderation, Religion

INDONESIA

STRATEGI GURU PAI DALAM MENANAMKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA PADA SISWA DI KABUPATEN SIAK

Artikel ini menjelaskan tentang Peraturan Menteri Agama yang menyatakan bahwa guru agama dituntut untuk bisa memperkuat moderasi beragama di kalangan siswa, maka guru PAI di Kabupaten Siak melakukan upaya pembinaan moderasi beragama yang ditujukan kepada siswa melalui pelbagai strategi, dan metode pembinaan tertentu untuk membangun nilai-nilai moderasi beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menggambarkan bagaimana upaya guru PAI dalam pembinaan tentang moderasi beragama; *Kedua*, untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam pembinaan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru PAI dalam pembinaan moderasi beragama adalah dengan melakukan pembinaan di dalam maupun di luar kelas menggunakan strategi dan metode. Strategi yang digunakan adalah strategi langsung dengan memberikan arahan, teladan, baik di dalam maupun di luar kelas dan strategi tidak langsung, dengan memberikan larangan dan pencegahan. Sedangkan metode yang digunakan adalah: (a) metode keteladanan, dengan memberikan teladan yang baik bagi siswa; (b) metode pemberian nasihat, dengan memberikan nasihat sebelum dan menjelang berakhirnya pembelajaran; (c) metode kedisiplinan, dengan memberikan peraturan; (d) pembiasaan, dengan membiasakan siswa untuk mengikuti pengajian dan apel; (e) metode pemberian perhatian khusus, dengan memperhatikan perkembangan sikap siswa yang mencerminkan moderasi beragama; serta (f) metode pemberian hukuman, dengan memberikan sanksi berupa pengurangan nilai agama bagi siswa yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Guru PAI, Moderasi, Beragama

Jurnal Ilmiah **GEMA PERENCANA**, Volume 2, Nomor 1, Mei-Agustus 2023; 161 - 174

Setiyono

Kanwil Kemenag Provinsi Jambi

E-mail: idan.aja33@gmail.com

INGGRIS

MADRASAH EDUCATION PLANNING STRATEGY IN SUPPORTING ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS (SPBE)

This article describes the importance of the Electronic-Based Government System (SPBE) digital platform for government organizations and in educational institutions, especially for religion-based education (madrasah). Information and communication technologies are needed to make education more accessible while raising teaching standards. Information and communication technology is intended as a system that uses ICT technology so that all stakeholders can carry out their respective tasks easily and quickly. The purpose of this research is to plan madrasah education in support of SPBE. The research methodology used in this study was to use library research. The results of this study show that the Education Management Information System (SIMP) in madrasa is very helpful in being able to increase user access to open data in a timely manner without relying on any third-party components of the current information system. An education management information system (SIMP) combines Human Resources and Information Technology tools to collect, organize, store, and provide ready-to-use access to information for use in making decisions about education programs and policies. Information such as student data, student grades, and so on is provided by an Islamic education management information system (madrasah) to assist in management, planning and monitoring processes within an organization, in addition to supporting the electronic-based government system (SPBE) program. Therefore, the cooperation of various parties is needed, such as: the government, parties engaged in education, as well as technology and information experts to implement Management Information Systems in the field of madrasah education.

Keywords: Madrasa, Management, Information, Systems, Education

INDONESIA

STRATEGI PERENCANAAN PENDIDIKAN MADRASAH DALAM MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Artikel ini menguraikan tentang pentingnya platform digital Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi organisasi pemerintah dan di lembaga pendidikan, khususnya untuk pendidikan yang berbasis agama (madrasah). Teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk membuat pendidikan lebih mudah diakses sekaligus meningkatkan standar pengajaran. Teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan sebagai suatu sistem yang menggunakan teknologi TIK agar semua pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan mudah dan cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk merencanakan pendidikan madrasah dalam mendukung SPBE. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) di madrasah sangat membantu dalam mampu meningkatkan akses pengguna ke data yang terbuka secara tepat tanpa bergantung pada komponen pihak ketiga mana pun dari sistem informasi saat ini. Sistem informasi manajemen pendidikan (SIMP) menggabungkan perangkat Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, dan menyediakan akses siap pakai ke informasi untuk digunakan dalam membuat keputusan tentang program dan kebijakan pendidikan. Informasi seperti data siswa, nilai siswa, dan sebagainya disediakan oleh sistem informasi manajemen pendidikan Islam (madrasah) untuk membantu proses pengelolaan, perencanaan, dan pemantauan dalam suatu organisasi, selain untuk mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, seperti: pemerintah, pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan, serta ahli teknologi dan informasi untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen di bidang pendidikan madrasah.

Kata Kunci : Madrasah, Sistem, Informasi, Manajemen, Pendidikan